BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

a. Dekade 1945-1947 (Berbentuk Jawatan Kehutanan)

Dikarenakan keadaan politik, jawatan kehutanan hanya dapat menjalankan tugasnya di Sumatera dan Jawa saja dengan susunan organisasi yang sangat sederhana. Di Jawa Barat sebagai pimpinan pada waktu itu adalah R.O Nurhadi yang diangkat sebagai Inspektur Kehutanan bagian I Bandung dengan surat ketetapan Menteri Departemen Kemakmuran tanggal 24 Oktober 1945 no.735/A/Keh. Pada masa Revolusi itu tugas pokok Jawatan Kehutanan adalah turut mempertahankan *De Facto* Republik Indonesia dan menyelamatkan harta kekayaan negara bersama militer dan pemerintahan sipil lainnya.

b. Dekade 1947-1952 (Berbentuk Van De Dienst Boswezen Van Negara Pasundan)

Tahun 1947 di Jawa Barat berbentuk Negara Pasundan dan Instansi Kehutanan berubah menjadi *De Dienst Van Boswezen Van* Negara Pasundan yang dipimpin oleh C.Y Moel sampai dengan tahun 1949. Pada saat itu juga, kehutanan mulai disusun secara federatif. Dan pada pertengahan tahunnya dibentuk Planologi Kehutanan (menangani Bidang Perencanaan Hutan) yang terpisah dari pengelolaan, dipimpin oleh
R.H Odang Prawiradiredja sampai dengan tahun 1952.

Pada tahun 1951 terbit Surat Keputusan Jawatan Kehutanan tertanggal 17 November 1951 no.4212 yang memutuskan bahwa terhitung 1 September 1951 dibentuk Brigade I Planologi di Indonesia dimana Planologi Kehutanan Jawa Barat ditetapkan sebagai Brigade I Planologi Kehutanan Jawa Barat yang dipimpin oleh R. Oesman Nandika.

Peraturan pemerintah no.20/1952 menetapkan kehutanan di Jawa/Madura dibagi-bagi menjadi beberapa Inspeksi Kehutanan bagian I. Bertindak sebagai

Inspektur waktu itu adalah R. Koesnowarso tetapi tidak lama kemudian diganti oleh M. Saroso.

c. Dekade 1953-1955 (Berbentuk Inspeksi Kehutanan)

Pada tahun 1953 Kepala Jawatan Kehutanan dengan Surat Keputusan tanggal 1 Oktober 1953 no.I/KD/I/5 mengukuhkan susunan organisasi setiap Inspeksi, sehingga mempertegas garis komando dan koordinasi.

Oleh karena pada tahun 1954 M. Saroso meninggal dunia, R. Oesman Nandika yang semula menjabat Kepala Brigade I Planologi Kehutanan Jawa Barat dialih tugaskan menjadi Inspektur Jawatan Kehutanan bagian I Jawa Barat dan Kepala Brigade I Planologi Kehutanan Jawa Barat di jabat oleh Adang Durahman.

d. Dekade 1956-1978 (Berbentuk Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Swatantra Tingkat I Jawa barat)

Pada tahun 1957 terbit peraturan pemerintah no.64/1957 menetapkan penyerahan sebagian dari urusan pemerintah pusat di lapangan perikanan laut, kehutanan dan karet rakyat pada daerah-daerah Swatantra Tingkat I, maka berubahlah status Inspeksi Kehutanan bagian I Jawa Barat menjadi Dinas kehutanan Propinsi Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat.

R. Oesman Nandika selaku kepala Dinas pertama yang menduduki jabatan itu sampai masa pensiunnya tahun 1964, digantikan oleh Adang Durahman sampai tahun 1971.

Tahun 1971 sampai dengan Mei 1974 Dinas Kehutanan Propinsi Tingkat I Jawa Barat dipimpin oleh Sulaiman Partadisastra yang selanjutnya digantikan oleh Rd. Oesman Mu'min BSc. F sebagai pejabat Kepala Dinas Definitif sampai akhir Februari 1978.

Brigade Planologi Kehutanan Jawa Barat selama periode 1964 - 1971 mengalami dua kali pergantian pimpinan, yaitu Yunus Kartasubrata dan Andi Abdul Rifai yang selanjutnya digantikan oleh M. Simbolon pada awal tahun 1974.

e. **Dekade 1978-2001 (Berbentuk Perum Perhutani Unit III Jawa Barat/BUMN)**

Pada awal tahun 1978 status Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat berubah menjadi Unit III Perum Perhutani Jawa Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah RI no. 2 tahun 1978 tanggal 3 Februari 1978 dengan Kepala Unit yang pertama Suherman Buhron sampai tahun 1981. Peresmiannya dilakukan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 10 Februari 1978. Menarik kembali urusan bidang kehutanan yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah 64 tahun 1957 diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I. Maka dengan berdirinya Perum Perhutani Unit III Jawa Barat tersebut, untuk selanjutnya segala hak dan kewajiban kekayaan serta perlengkapan dari Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Jawa Barat beralih ke Perum Perhutani.

Pada waktu yang sama, Brigade Planologi Kehutanan Jawa Barat pun dilebur menjadi Biro Perencanaan Unit III Perum Perhutani Jawa Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian no. 121/KPTS/Org/2/1978 tanggal 27 Februari 1978 dan serah terima bidang Perencanaan Hutan Jawa Barat ke Perhutani dilakukan pada tanggal tersebut.

Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dibagi dalam beberapa wilayah, adapun pembagian wilayahnya itu terdiri dari 14 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang terdiri dari:

1. Kesatuan Pemangkuan Hutan Banten
2. Kesatuan Pemangkuan Hutan Bogor
3. Kesatuan Pemangkuan Hutan Sukabumi
4. Kesatuan Pemangkuan Hutan Cianjur
5. Kesatuan Pemangkuan Hutan Purwakarta
6. Kesatuan Pemangkuan Hutan Bandung Utara
7. Kesatuan Pemangkuan Hutan Bandung Selatan
8. Kesatuan Pemangkuan Hutan Garut

9. Kesatuan Pemangkuan Hutan Tasikmalaya

10. Kesatuan Pemangkuan Hutan Ciamis

11. Kesatuan Pemangkuan Hutan Kuningan

12. Kesatuan Pemangkuan HUtan Majalengka

13. Kesatuan Pemangkuan Hutan Indramayu

14. Kesatuan Pemangkuan Hutan Sumedang

f. Dekade 2001-2003 (Berbentuk Perusahaan Perseroan)

Berdasarkan PP No.14 tahun 2001 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum

Kehutanan Negara (Perum Perhutani) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

g. Dekade 2003-sekarang (Berbentuk Perusahaan Umum)

Berdasarkan PP No. 30 tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Perseroan (Persero) menjadi Perusahaan Umum (Perum).

2.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka dasar dalam manajemen sebuah perusahan dimana dengan mempelajari struktur organisasi, suatu perusahaan akan dengan mudah pula mempelajari kehidupan perusahaan, baik jenjang Otoritas, wewenang hubungan antara karyawan, maupun tanggung jawab. Masing-masing struktur organisasi ini menggambarkan hubungan yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan.

Bentuk struktur organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Perum Perhutani Unit III Jawa Barat telah ditetapkan dengan SK Direksi No. 828B/KPTS/Dir/1999 tanggal 21 September 1999 yang bentuknya nampak pada Lampiran 1.

Susunan Unit Perum Perhutani terdiri dari:

1. Kantor Unit

2. Kesatuan Pemangkuan Hutan

3. Kesatuan Unit Kerja Lain.

Unit III Perum Perhutani Jawa Barat dipimpin oleh pimpinan Unit yang terdiri dari Kepala Unit dan seorang Wakil Kepala Unit yang diangkat oleh Menteri Kehutanan atas usul dari Direktur Utama sebagai Pimpinan Direksi Perusahaan yang berkedudukan di Jakarta.

Kepala unit bertanggung jawab atas:

- Terselenggaranya penjabaran dan kebijakan strategi perusahaan menjadi strategi regional diwilayahnya.
- Terselenggaranya koordinasi antar satuan unit kerja di wilayahnya dalam rangka pencapaian kinerja yang optimal.
- Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian pada satuan unit kerja di wilayahnya.
- Bertanggung Jawab kepada Dewan Direksi.

Wakil Kepala Unit Bertugas:

- Mewakili Kepala Unit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Mewakili Kepala Unit apabila Kepala Unit berhalangan.
- Bertanggung jawab kepada Kepala Unit

Susunan Kantor Unit terdiri dari:

1. Biro Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan
2. Biro Perlindungan Sumber Daya Hutan
3. Biro Pembinaan Sumber Daya Hutan
4. Biro Produksi
5. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
6. Biro Industri dan Pemasaran
7. Biro Keuangan
8. Biro Pengawasan

Biro Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan

1. Biro Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

1.1 Membantu pimpinan dalam melaksanakan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha, termasuk Koordinasi Perencanaan Lintas Sektoral.

1.2 Menyusun RJP Unit yang merupakan penjabaran RJP Direksi dan menyiapkan proses pengesahannya oleh Direksi.

1.3 Menilai RPKH (Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan) KPH dan menyiapkan proses pengesahannya oleh Direksi.

1.4 Mengesahkan RTT KPH atas nama Kepala Unit.

1.5 Memimpin tim penilaian RUT KPH dan menyiapkan proses pengesahannya oleh Pimpinan Unit.

1.6 Menyusun draft RKAP Unit atas dasar RUT KPH dan RJP Unit.

1.7 Merupakan Pembantu Bendaharawan Material sesuai dengan kewenangannya.

1.8 Bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit.

2. Dalam melaksanakan tugas-tugas dan wewenangnya ini Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan dibantu oleh 4 seksi, yaitu:

a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Usaha.

b. Seksi Pengukuran dan Pemetaan.

c. Seksi Perencanaan Sarana dan Prasarana Hutan.

d. Seksi Perencanaan Hutan.

Biro Perlindungan Sumber Daya Hutan

1. Biro Perlindungan Sumber Daya Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

1.1 Membantu pimpinan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan bidang Perlindungan Sumber Daya Hutan.

1.2 Melakukan koordinasi ditingkat propinsi dengan instansi penegak hukum serta instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perlindungan Sumber Daya Hutan dan Kehumasan.

1.3 Menyelesaikan kasus-kasus sengketa kawasan hutan, tanah perusahaan dan sengketa-sengketa lainnya yang belum dapat diselesaikan di tingkat KPH.

1.4 Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang perlindungan sumber daya hutan.

1.5 Bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit.

2. Dalam melaksanakan tugas-tugas dan wewenangnya ini Kepala Biro Perlindungan Sumber Daya Hutan dibantu oleh 3 seksi, yaitu:
   a. Seksi Perlindungan Sumber Daya Hutan.
   b. Seksi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan.
   c. Seksi Humas.

Biro Pembinaan Sumber Daya Hutan

1. Biro Pembinaan sumber Daya Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
   1.1 Membantu pimpinan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan yang meliputi bidang reboisasi, rehabilitasi, pemeliharaan dan konservasi sumber daya hutan serta pembinaan masyarakat desa hutan.
   1.2 Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam rangka pembinaan masyarakat desa sekitar hutan.
   1.3 Melakukan monitoring, evaluasi, pengawasan serta pengendalian kegiatan pembinaan sumber daya hutan.
   1.4 Bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit.
2. Dalam melaksanakan tugas-tugas dan wewenangnya ini Kepala Biro Pembinaan Sumber Daya Hutan terdiri dari:
   a. Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan.
   b. Seksi Pemeliharaan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.
   c. Seksi Pembinaan Lingkungan.

Biro Produksi

1. Biro Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

1.1 Membantu pimpinan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan bidang Pemanfaatan Sumber Daya Hutan.

1.2 Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Produksi hasil hutan dan pemanfaatan sumber daya hutan lainnya.

1.3 Melakukan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan produksi hasil hutan dan pemanfaatan sumber daya hutan lainnya.

1.4 Bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit.

2. Dalam melaksanakan tugas-tugas dan wewenangnya ini Kepala Biro Produksi dibantu oleh 3 seksi, yaitu:
   a. Seksi Produksi kayu.
   b. Seksi Usaha Wisata dan Usaha Lain.
   c. Seksi Produksi non kayu.

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum

1. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

1.1 Membantu pimpinan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan bidang Manajemen Sumber Daya Manusia.

1.2 Membantu Pimpinan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan bidang umum.

1.3 Membantu pimpinan dalam melaksanakan kegiatan bidang teknik dan perlengkapan.

1.4 Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan umum, teknik dan perlengkapan.

1.5 Melakukan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya menusia dan umum serta teknik dan perlengkapan.

1.6 Sebagai Pembantu Bendaharawan Material Kantor Unit.

1.7 Bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit.

2. Dalam melaksanakan tugas-tugas dan wewenangnya ini Kepala Biro Sumber daya Manusia dan Umum dibantu oleh 3 seksi, yaitu:
   a. Seksi Sumber daya Manusia.
   b. Seksi Umum.
   c. Seksi Teknik dan Perlengkapan.

Biro Industri dan Pemasaran

1. Biro Industri dan Pemasaran hasil industri dipimpin oleh Kepala Biro yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
   1.1 Membantu pimpinan dalam pelaksanaan koordinasi bidang industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan dan hasil industri.
   1.2 Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemasaran hasil hutan, analisa pasar, promosi serta program pengujian dan sertifikasi hasil hutan.
   1.3 Melakukan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan bidang pemasaran, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan dan hasil industri.
   1.4 Bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit.
2. Dalam melaksanakan tugas-tugas dan wewenangnya ini Kepala Biro Industri dan pemasaran hasil industri dibantu oleh 4 seksi, yaitu:
   a. Seksi Industri Kayu dan Non Kayu.
   b. Seksi Analisa Pasar dan Promosi.
   c. Seksi Penjualan Hasil Hutan.
   d. Seksi Pengujian Hasil Hutan.

Biro Keuangan

1. Biro Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:
   1.1 Membantu pimpinan dalam melaksanakan pengelolaan bidang keuangan.
   1.2 Membantu pimpinan dalam melaksanakan kegiatan bidang sistem informasi manajemen.

1.3 Melakukan koordinasi bidang keuangan dan Sistem Informasi Manajemen.

1.4 Merupakan Bendaharawan Keuangan di tingkat unit.

1.5 Melakukan monitoring, evaluasi, pengawasan serta pengendalian pekerjaan pada butir 1.1 dan 1.2 diatas.

1.6 Bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit.

2. Dalam melaksanakan tugas-tugas dan wewenangnya ini Kepala Biro Keuangan dibantu oleh 3 seksi, yaitu:

a. Seksi Sistem Informasi Manajemen.

Kepala Seksi Sistem Informasi Manajemen bertugas:

- Membantu terserlenggaranya pelaksanaan dan koordinasi kegiatan pengolahan data yang dibutuhkan manajemen.
- Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan analisa serta penyajian data.
- Menyediakan laporan periodik maupun insidentil baik untuk kepentingan internal maupun eksternal.
- Melakukan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian program data dan informasi.
- Bertanggung jawab kepada Kepala Biro Keuangan.

b. Seksi Akuntansi

Kepala Seksi Akuntansi bertugas:

- Membantu terselenggaranya program akuntansi dan akuntansi biaya.
- Melakukan verifikasi bidang keuangan diwilayah unit.
- Melaksanakan koordinasi bidang akuntansi keuangan dan akuntansi biaya.
- Melakukan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan akuntansi keuangan dan akuntansi biaya.
- Bertanggung jawab kepada Biro Keuangan.

c. **Seksi Anggaran dan Pembelanjaan**

Kepala Seksi Anggaran dan Pembelanjaan bertugas:

- Membantu terselenggaranya kegiatan anggaran pendapatan dan pembelanjaan perusahaan dan perpajakan.
- Sebagai pembantu Bendaharawan Keuangan.
- Melakukan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja perusahaan.
- Bertanggung jawab kepada Kepala Biro Keuangan.

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

Biro Pengawasan

1. Biro Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
   1.1 Membantu pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan intern keuangan perusahaan.
   1.2 Memimpin pelaksanaan pemeriksaan khusus sesuai dengan kepentingan perusahaan.
   1.3 Mengadakan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut (PTL) hasil-hasil pengawasan.
   1.4 Melaksanakan koordinasi dengan SPI dan pemeriksa ekstern.
   1.5 Bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit.
2. Dalam melaksanakan tugas-tugas dan wewenangnya ini Kepala Biro Pengawasan dibantu oleh 1 seksi, yaitu Seksi Pengawasan Wilayah.

2.3 Aktivitas Perusahaan

Aktivitas perusahaan yang disajikan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan yang terkait dengan Kerja Praktek yang dilakukan oleh penulis. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten terdiri dari pengelolaan hutan, perlebahan, dan pengelolaan Wana Wisata.

Adapun penjelasan untuk masing-masing aktivitas tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Pengelolaan Hutan

a. Perencanaan Hutan

Tujuan perencanaan hutan adalah untuk mencapai hasil yang maksimum berdasarkan prinsip pengelolaan hutan yang lestari dan serbaguna.

Perum Perhutani membuat rencana manajemen sebagai berikut:

- Rencana umum Perusahaan (RUP) adalah rencana jangka panjang dan bersifat menyeluruh yang memuat kebijaksanaan dan strategi serta upaya-upaya pengerahan sumber daya didalam mencapai tujuan perusahaan.
- Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) adalah rencana dalam rangka mewujudkan hutan secara lestari untuk setiap kelas perusahaan diwilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH). Rencana pengaturan kelestarian hutan adalah merupakan dasar utama untuk menyusun rencana-rencana lainnya agar dapat terjamin kelestarian hutan, hasil hutan dan pemanfaatan hutan. Untuk dapat menyusun RPKH perlu dilaksanakan penataan hutan yang meliputi kegiatan-kegiatan tata batas, pembagian hutan dalam petak-petak, perisalahan (Inventarisasi) hutan, pembukaan wilayah atau pembuatan alur, pengukuran dan perpetaan.
- Rencana lima tahun perusahaan (RLTP) adalah rencana yang memuat kebijaksanaan operasional dan pelaksanaan upaya-upaya untuk mencapai sasaran perusahaan dalam kurun waktu 5 tahun. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan (RKTP) adalah rencana kegiatan secara terinci yang akan dilaksanakan dalam satu tahun sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perusahaan.
- Rencana Teknik Tahunan (RTT) adalah perencanaan fisik kegiatan yang akan dilaksanakan, disusun oleh tingkat pelaksana

(ADM/KKPH) 2 tahun sebelum tahun pelaksanaan kerja yang selanjutnya disahkan oleh Biro Perencanaan.

b. Reboisasi

Permudaan buatan dengan tanaman diselenggarakan melalui sistem tumpang sari, banjar harian, tanaman naungan *(schaduerijen cultuur)* dan komplangan. Semua teknik penanaman tersebut menggunakan tenaga penduduk setempat sebagai pengontrak dan sebagai buruh. Sasaran utama penggunaan teknik-teknik tersebut adalah untuk memperoleh tegakan hutan yang tumbuh baik dan berkualitas. Reboisasi dilakukan tidak hanya pada areal bekas tebang habis tetapi pada kawasan hutan yang tidak produktif.

c. Pemeliharaan Hutan

Tujuan pemeliharaan hutan adalah untuk mendapatkan potensi tegakan yang berkualitas dan mempunyai nilai ekonomi tinggi diakhir daur serta menjaga kesuburan tanah dan kelestarian lingkungan. Pemeliharaan hutan bisa berupa pemangkasan tanaman sela pada tanaman hutan muda, penyiangan, penjarangan, pencegahan terhadap gangguan pengembalaan dan kebakaran hutan dari hama dan penyakit lain-lain.

d. Pemungutan Hasil Hutan

Dalam pemungutan hasil hutan Perum Perhutani menerapkan sistem padat karya untuk memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar hutan.

Hasil hutan dapat berupa hasil hutan non kayu. Pemungutan hasil hutan kayu terdiri dari penebangan, pembagian batang, penyadapan, pengangkutan, dan penumpukan. Dimana keempat proses pemungutan hasil hutan tersebut adalah sebagai berikut:

Pengelolaan Wana Wisata

Tugas pengusahaan hutan Perum Perhutani di Jawa mencakup peningkatan segala potensi sumber daya hutan, termasuk untuk kepentingan wisata alam. Tugas tersebut diwujudkan dalam bentuk pembangunan objek wisata hutan

yang disebut Wana Wisata, yaitu suatu kawasan hutan yang karena keindahan ataupun keunikan alamnya dapat dijadikan tempat untuk rekreasi, pendidikan, maupun olah raga. Pembangunan Wana Wisata sejalan dengan upaya pemerintah dalam memajukan sektor pariwisata, baik untuk kepentingan Wisatawan Nusantara maupun Wisatawan Mancanegara.

Kegiatan tersebut berkaitan erat dengan tugas pokok Perum Perhutani sebagai BUMN dalam meningkatkan manfaat hutan secara optimal dan berkesinambungan, baik manfaat ekonomis, hidrologis maupun sosial ekonomis.

Secara garis besar sasaran usaha pembangunan dan pengembangan Wana Wisata adalah:

- Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi masyarakat luas dengan menikmati keindahan, keunikan, serta kenyamanan suasana lingkungan yang alamiah.
- Menyediakan tempat bagi sarana pengembangan ilmu pengetahuan flora, fauna, ekologi hutan serta pembinaan rasa cinta alam bagi generasi muda.
- Memperluas kesempatan berusaha untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar.
- Meningkatkan pendapatan perusahaan.

Pemasaran

Pemasaran hasil hutan berupa kayu dan non kayu diperuntukkan bagi pemasaran dalam negeri dan luar negeri (ekspor). Sampai saat ini pola penjualan dalam negeri dilaksanakan melalui saluran lelang untuk umum dan penjualan langsung untuk industri menengah, kecil, koperasi dan masyarakat setempat. Jaringan pemasaran luar negeri diperlukan dan dimanfaatkan dengan menunjuk agen-agen penjualan antara lain di Indonesia, Singapura, Hongkong, Jepang, Korea, India, Italia, dan Amerika Serikat.

Kebijaksanaan pemasaran ditempuh dengan menetapkan strategi pemasaran diantaranya:

- Meningkatkan produksi barang yang berorientasi ekspor dan memiliki nilai tambah tinggi.
- Meningkatkan kerja sama dengan mitra usaha yang berorientasi ekspor atas dasar saling menguntungkan dalam mengembangkan diversifikasi produk hilir.
- Menetapkan harga yang kompetitif dalam bentuk penetapan harga yang fleksibel.
- Mempertahankan eksistensi kayu jati sebagai produk unggulan perusahaan sambil meningkatkan peranan produk non kayu, kayu rimba dan usaha wisata.
- Mengadakan promosi dengan melalui pameran maupun iklan didalam dan di luar negeri serta meningkatkan pelayanan terhadap konsumen.
- Mengadakan penelitian pasar *(Market Inteligence)* dalam rangka memperluas pasar dan memantau harga yang terjadi.